

# MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BAPPEDA

TAHUN : 2021

| Langkah 1   | Langkah 2  | Langkah 3   | Langkah 4   | Langkah 5  | Langkah 6   | Langkah 7  | Langkah 8   |
|---|--|---|---|--|---|--|---|
|   |  |   | ISU GENDER  |  | KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN                               |  | PENGUKURAN HASIL  |
| Nama Kebijakan/Program/Kegiatan   | Data Pembuka Wawasan   | Faktor Kesenjangan  | Sebab Kesenjangan Internal  | Sebab Kesenjangan Eksternal  | Reformulasi Tujuan  | Rencana Aksi   | Data Dasar (Base-Line)  |
| <p><b>Program :</b><br/>Perencanaan Sosial dan Budaya</p> <p><b>Kegiatan :</b><br/>Pembinaan Forum Kota Sehat</p> <p><b>Tujuan :</b><br/>Terwujudnya Kota yang Sehat di Kota Padang Panjang</p> | <p>Kota Padang Panjang sudah memperoleh Wistara sebanyak 5 kali. Sekarang menuju yang ke 6 dengan memilih 7 tatanan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatanan Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat</li> <li>2. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi</li> <li>3. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat</li> <li>4. Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat</li> <li>5. Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi</li> <li>6. Tatanan Kehidupan Masyarakat sehat yang Mandiri</li> <li>7. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat.</li> </ol> | <p><b>Akses</b><br/>Dalam melakukan pembinaan 7 tatanan Kota Sehat akses kita untuk mewujudkan tatanan yang Responsif Gender masih terbatas</p> <p><b>Partisipasi</b><br/>Dalam mewujudkan tatanan Kabupaten/Kota Sehat masih belum melibatkan seluruh komponen seperti Hak anak2, lansia, disabilitas dan ibu hamil.</p> <p><b>Kontrol</b><br/>Yang berwenang dalam mewujudkan tatanan Kota sehat masih belum memperhatikan kebutuhan Gender</p> | <p>Kurang sosialisasi kebijakan Responsif Gender pada setiap tatanan</p> <p>Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam mewujudkan tatanan yang Responsif Gender</p> | <p>Kurangnya dukungan masyarakat tentang kegiatan yang Responsif Gender</p> <p>Kurangnya dukungan Stakeholder dalam mewujudkan tatanan yang Responsif Gender.</p> <p>Indikator yang ditetapkan oleh Pusat dalam mewujudkan tatanan Kab/Kota sehat (KKS) belum mengakomodir kebijakan yang Responsif Gender</p> | <p>Terwujudnya tatanan Kota Sehat yang Responsif Gender</p> | <p>Sosialisasi Kebijakan Responsif Gender kepada seluruh Stakeholder yang terkait dengan tatanan Kota Sehat</p> <p>Membangun Komitmen pimpinan untuk mewujudkan tatanan Kota Sehat yang responsif Gender</p> | <p>Terwujudnya tatanan kota sehat yang Responsif Gender</p>   |
|   |  |   |   |  |   |  | <p><b>Indikator</b><br/>Keg Pem Foru Seha Inpu Rp.</p> <p><b>Out</b><br/>Jum Kota yang</p> <p><b>Out</b><br/>Terv yang Kota Pan</p> |



| Langkah 1                           | Langkah 2               | Langkah 3   | Langkah 4                        | Langkah 5                      | Langkah 6             | Langkah 7    | Langkah 8                  |
|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Nama Kebijakan/<br>Program/Kegiatan | Data Pembuka<br>Wawasan | Faktor Kesenjangan  | ISU GENDER                       |                                | Reformulasi<br>Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-<br>Line) |
|                                     |                         | Manfaat<br>Tatanan Kota Sehat<br>belum memberikan<br>manfaat yang<br>maksimal kepada<br>seluruh lapisan<br>masyarakat | Sebab<br>Kesenjangan<br>Internal | Sebab Kesenjangan<br>Eksternal |                       |              |                            |

Padang Panjang, 2 Maret 2020

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



**RUSDIANTO, S.IP MM.**

Pembina Utama Muda, NIP. 19640402 198602 1 003

## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kota Padang Panjang

TAHUN : 2021

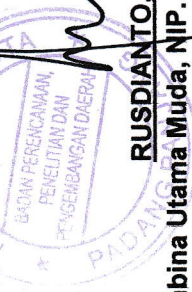
| Langkah 1   | Langkah 2   | Langkah 3   | Langkah 4   | Langkah 5  | Langkah 6  | Langkah 7   | Langkah 8  | Langkah 9  |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Nama Kegiatan/Program   | Data Pembuka wawasan  | Faktor Kesenjangan  | Sebab Kesenjangan Internal                            | Sebab Kesenjangan Eksternal  | Reformulasi Tujuan                                   | Rencana Aksi  | Basis Data (Base-Line)                                   | Indikator  |
| <p><b>Program :</b><br/>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p><b>Kegiatan :</b><br/>Pemantauan dan Evaluasi PUG</p> <p><b>Tujuan :</b><br/>Terwujudnya perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamatakan setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.</li> <li>- Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan Pokja PUG baru sebatas SK</li> <li>- Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal</li> <li>- PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan</li> <li>- Fokal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap sebagai kebutuhan</li> </ul> | <p><b>Akses</b><br/>Terbatasnya informasi terkait dengan PUG dan PPRG</p> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Kepala OPD masih kurang ditandai dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan Sosialisasi atau dalam mendaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS</li> </ul> <p><b>Kontrol</b><br/>Pemantauan dan Evaluasi pengarusutamaan gender di Kota Padang Panjang</p> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih dianggap sebagai beban tambahan.</li> <li>- Manfaat penerapan GAP dan GBS tidak langsung terasa karena tidak ada</li> </ul> | <p>- Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaannya</p> | <p>- PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja</p> | <p>Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelaahan GAP dan GBS OPD</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG</li> </ul> | <p>- OPD yang sudah membuat GAP dan GBS sudah 24 OPD</p> | <p>Kegiatan Peman Evaluasi peng gender Padang Input; Rp. 42. Output; Pengar yang R Gender Outcom Terwujud Pengar Gender Padang ...</p> |



| Langkah 1                       | Langkah 2   | Langkah 3            | Langkah 4                   | Langkah 5                   | Langkah 6                     | Langkah 7          | Langkah 8    | Langkah 9        |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Nama Kebijakan/Program/Kegiatan | Data Pembuka wawasan  | Faktor Kesenjangan   | ISU GENDER                  |                             | KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN | REFORMULASI TUJUAN | RENCANA AKSI | PENGUKURAN HASIL |
|                                 |   |                      | Faktor Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal |                               |                    |              |                  |
|                                 | - Belum semua OPD menindaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan Dasar Hukum, data terpilah dan issue gender di dalam Renstra OPD. | Punishmen dan Reward |                             |                             |                               |                    |              |                  |

Padang Panjang, 2 Maret 2020


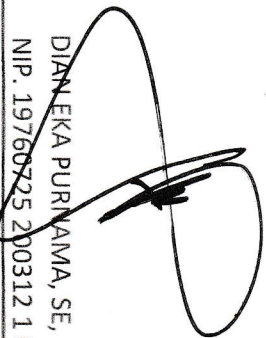
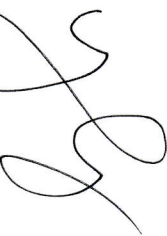

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG



**RUSDIANTO, S.IP MM.**

Pembina Utama Muda, NIP. 19640402 198602 1 003

PENELAHAHAN GAP OPD BAPPEDA TAHUN 2020  
PERSETUJUAN TIM PENGGERAK PPRG KOTA PADANG PANJANG

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA  | KABID ANGGARAN PADA BPKD  | IRBAN WILAYAH II PADA INSPEKTORAT   | KABID P3A PADA DINAS SOSIAL<br>PPKBP3A   |
| <br>NETTI HERAWATI, SH<br>NIP. 19660603 199312 2 002 | <br>DIAN EKA PURNAMA, SE, M.SI<br>NIP. 19760725 200312 1 003 | <br>YONHENDRIL, SE, Akt, M. SI<br>NIP. 19740614 199903 1 005 | <br>HARTATI, SH<br>NIP. 19640917 199003 2 003 |